

ABSTRAK

Perlindungan pesepeda di Indonesia masih dirasa kurang, karena di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur terkait sepeda itu sendiri. Dalam UU LLAJ, pesepeda diberikan perlindungan yaitu dengan cara mendapatkan hak untuk diutamakan keselamatan, tetapi dalam prakteknya pengendara kendaraan bermotor masih banyak yang belum menyadari hak-hak pesepeda. Sering kali ditemui di jalanan bahwa sekalipun pesepeda telah berkendara pada kiri jalan, masih saja terjadi kecelakaan dengan pengendara kendaraan bermotor. Akibat dari pelanggaran aturan yang ada dan norma ini, timbul sebuah perbuatan melanggar hukum (PMH). Akibat dari adanya sebuah permasalahan yang terjadi akan menimbulkan sebuah sengketa dimana pihak yang merasa dirugikan akan menuntut sedemikian rupa baik dalam bentuk gugatan ataupun penyelesaian sengketa lainnya, umumnya dalam hal ini apabila terjadi kecelakaan antara sepeda dengan kendaraan bermotor hanya dengan ganti kerugian atau mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga tentu permasalahan ini akan dapat lebih mudah di selesaikan. Untuk membahas permasalahan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dimana undang-undang ataupun peraturan yang dikaji adalah aturan yang sesuai pada permasalahan yang ada. Pesepeda apabila menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor ternyata mendapatkan perlindungan dari Jasa raharja sekalipun ia sebelumnya tidak memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut timbul karena atas dasar undang-undang. Terkait dengan penyelesaian sengketa antara para pihak tersebut, dapat melalui jalur pengadilan ataupun diluar pengadilan misalnya mediasi.

Kata kunci: Pesepeda, UULLAJ, Jasa Raharja, Asuransi

ABSTRACT

The protection of cyclists in Indonesia is still felt less, because in Indonesia itself there are no specific rules governing bicycles themselves. In the LLAJ Law, cyclists are given protection by obtaining the right to safety, but in practice there are still many motorists who are not aware of the rights of cyclists. It is often found on the road that even if the cyclist has been driving on the left side of the road, there are still accidents with motorists. As a result of violations of existing rules and norms, an unlawful act arises (PMH). As a result of a problem that occurs will result in a dispute in which the party who feels aggrieved will sue in such a way either in the form of a lawsuit or other dispute resolution, generally in this case in case of an accident between a bicycle and a motor vehicle only with compensation or mediation carried out by a third party of course this problem will be more easily resolved. To discuss the problem, the research method used is normative juridical where the law or regulation reviewed is the appropriate rule on the existing problem. The cyclist if he becomes a victim of a traffic accident caused by a motor vehicle turns out to get protection from raharja services even though he previously had no legal relationship. The relationship of the law arises because of the basis of the law. Related to the settlement of disputes between the parties, can be through court lines or outside the court such as mediation.

Keywords: Cyclelist, UULLAJ, Jasa Raharja, Insurance